

Collaborative Governance: Membangun Solusi Bersama Dalam Penanggulangan Stunting

Herni Herni^{1*}, Nurbiah Tahir², Sitti Rahmawati Arfah³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

Stunting is a condition of body failure in children due to chronic malnutrition, so children become too short for their age. The purpose of this study was to analyse Stunting Prevention in Barugae Village, Duampanua District, Pinrang Regency using the Collaborative Governance Model. This research uses qualitative research methods. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that collaboration is quite effective by looking at initial conditions, institutional design regarding basic rules in stunting prevention, leadership and Collaborative processes in implementing stunting prevention programmes. However, there are several obstacles in the collaboration to overcome stunting in Barugae Village, namely the lack of awareness among mothers of toddlers about child nutrition. Then, there is a lack of awareness of mothers to bring their children to the Posyandu, as well as people who are entitled to WC but do not have land.

Keywords: *Collaborative governance, public policy, stunting prevention*

Abstrak

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Penanggulangan Stunting di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dengan menggunakan Model *Collaborative Governance*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi cukup efektif dengan melihat kondisi awal, desain kelembagaan mengenai aturan dasar dalam penanggulangan stunting, kepemimpinan dan proses kolaboratif dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting. Tetapi terdapat beberapa kendala dalam kolaborasi penanggulangan stunting di Desa Barugae yaitu kurangnya kesadaran ibu balita terhadap gizi anak. Kemudian kurangnya kesadaran ibu-ibu membawa anaknya ke posyandu, serta masyarakat yang berhak mendapat WC tetapi tidak memiliki lahan.

Kata kunci: *Collaborative governance, kebijakan publik, penanggulangan stunting*

* herni.herni@gmail.com

PENDAHULUAN

Kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan suatu proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah (Arsandi, 2022; Castañer & Oliveira, 2020). Sedangkan Eriksson et al., (2022) mendefinisikan *Collaborative* yaitu suatu bentuk aktivitas yang dilakukan oleh dua institusi atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan “*Public value*” dari pada bekerja sendiri-sendiri.

Kolaborasi dalam kajian administrasi publik merupakan sebuah konsep yang penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik (Lapuenta & Van de Walle, 2020). Kolaborasi tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, untuk bekerja sama dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan dan program publik. Dengan kolaborasi yang baik, sumber daya dan keahlian dari berbagai sektor dapat digabungkan untuk mengatasi berbagai tantangan kompleks yang dihadapi oleh pemerintah (Bianchi et al., 2021). Selain itu, kolaborasi juga memungkinkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan, sehingga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi publik (Sari, 2023).

Governance menurut istilah mengacu pada tindakan pemerintah baik itu depan umum dan sektor swasta (Kjaer, 2023). *Governance* sebagai sarana untuk mengarahkan proses yang mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam swasta, pemerintah dan masyarakat sipil (Farhanuddin et al., 2021). *Governance* adalah seperangkat kegiatan koordinasi dan pemantauan yang memungkinkan kelangsungan kemitraan atau keberlangsungan kolaborasi (Arsandi, 2022).

Menurut Ansell & Gash, (2008) Istilah *Collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintah yang melibatkan secara langsung stakeholder di luar pemerintahan, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.

Collaborative governance adalah proses politik dalam pengambilan kebijakan pemerintah dengan mencakup berbagai unsur stakeholder untuk mencapai kepentingan Bersama (Nasrulhaq, 2020; Suwarna, 2023). Pemerintah dengan segala upayanya

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>

tidak bisa mengatasi semua persoalan, perlu keterlibatan banyak pihak untuk membantu merencanakan dan memberikan otoritas penuh, melibatkan orang-orang melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, swasta, dan masyarakat sipil untuk melaksanakan tujuan publik (Emerson et al., 2012).

Ansell & Gash, (2008) mengemukakan pengertian kolaborasi di bedakan ke dalam dua pengertian sebagai berikut: (a) Kolaborasi dalam arti proses yaitu tata cara mengatur, mengelola atau mengatur suatu lembaga. Sejumlah organisasi pemerintah dan non-pemerintah atau pemangku kepentingan terlibat sesuai pada kepentingan dan tujuannya. (b) Kolaborasi dalam arti normative, aspirasi atau tujuan-tujuan filosofis bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksi dengan para patner atau mitranya.

Salah satu model *Collaborative governance* yang memiliki empat variabel sebagai berikut yaitu (1) Kondisi awal mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi dimana dapat menjadi dukungan ataupun penghambat kerja sama antar pemangku kepentingan dan antara lembaga atau organisasi. Ketidak seimbangan pengaruh/kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku

kepentingan, sejarah masa lalu yang terjadi baik berupa kerja sama yang telah dilakukan atau konflik yang pernah terjadi di antara pemangku kepentingan dan bentuk dorongan serta kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi tersebut. (2) Desain Kelembagaan merujuk pada aturan dasar dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah legalitiasi secara prosedur dalam proses kolaborasi. (3) Kepemimpinan Kolaborasi sangat mungkin terjadi dan ditemukan adanya konflik yang tinggi dan adanya ketidakpercayaan yang besar antara pemangku kepentingan, tetapi biasanya terdapat keinginan para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi, maka disinilah dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh pemangku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam kolaborasi. (4) Proses kolaborasi Proses kolaborasi terdapat lima yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses kolaborasi, pemahaman bersama, dan hasil sementara (Ansell & Gash, 2008).

Berbagai penelitian yang berkaitan terkait *Collaborative governance* masih sangat sering dilakukan seperti penelitian yang membahas terkait konsep *Collaborative governance* dalam

pelaksanaan perlindungan pekerja migran di Indonesia (Nada et al., 2020). Terdapat juga penelitian terkait konsep *Collaborative governance* dalam pencegahan peredaran narkoba di Indonesia (Samsurizal et al., 2023). Selain itu, penelitian dari Mahadiansar et al., (2023) menganalisis terkait upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dengan adanya potensi pariwisata membutuhkan adanya konsep *Collaborative governance*. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa penelian tersebut menunjukkan bahwa topik *Collaborative governance* masih sering dan penting untuk diteliti baik dari segi pembangunan, sosial, ekonomi.

Konsep *Collaborative governance* dalam penanggulangan stunting sangat banyak diteliti, dan masih menjadi topik yang hangat untuk dibahas. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Tinov et al., (2023) menyampaikan bahwa masalah stunting merupakan masalah nasional yang perlu melibatkan dan kerjasama multisektoral antara pemerintah pusat sampai ke pemerintah desa. Penurunan angka stunting juga dipengaruhi oleh adanya keterlibatan dari berbagai sektor terutama hubungan antara pemerintah dan swasta (Nasution & Trimurni, 2024). Setiap sektor memiliki perannya masing-masing dalam mengatasi masalah stunting bagi

kalangan balita termasuk ibu PKK, Kader Posyandu, Akademisi, Bakti Sosial, LPMK, Bhabinkamtibmas dan swasta (Arumsari et al., 2024). Selain itu, kehadiran pemerintah, swasta bahkan militer juga berperan aktif dalam mengurangi kasus stunting, hal tersebut membuktikan partisipasi dan kerjasama lintas sektor sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah sosial termasuk penanganan stunting (Rusliadi & Aina, 2024). Dari berbagai pernyataan tersebut, membuktikan bahwa konsep *Collaborative governance* memang sangat penting dan memiliki kontribusi dalam mengatasi masalah sosial, terutama pengetasan masalah stunting di Indonesia. Sehingga pemerintah, perlu melibatkan segala sektor yang ada dalam mengatasi masalah stunting yang ada.

Hal itulah yang kemudian menjadi dasar sehingga penelitian ini dilakukan, karena konsep *Collaborative governance* masih sangat penting untuk diteliti. Adapun salah satu masalah yang dianggap penting untuk melihat sejauh mana peran *colaborative governance* ialah terkait masalah kesehatan. Masalah kesehatan erat kaitannya dengan masalah kemiskinan termasuk masalah kekurangan gizi (Siddiqui et al., 2020).

Masalah gizi saat ini dialami Indonesia yaitu balita yang memiliki postur tubuh pendek (*stunting*) dan kurus

serta masalah anemia dan kurang energi kronik terhadap ibu hamil (Kompas.Com, 2022). Stunting menyebabkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan yang buruk, dapat menyebabkan kemiskinan yang berkelanjutan (Fauziah et al., 2022). Salah satu kebijakan nasional dalam upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi masyarakat yaitu perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan pelaku sadar gizi, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi serta kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Adapun fokus dari penelitian ini ialah terkait jumlah balita stunting di Kabupaten Pinrang. Jumlah kasus stunting pada tahun 2019 sebanyak 3.676, pada tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 3.154, sedangkan pada tahun 2021 balita stunting sekitar 2.688. Meskipun penderita stunting di Kabupaten Pinrang mengalami penurunan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Tetapi Kabupaten Pinrang masih memiliki masalah kesehatan yang dialami masyarakat, maka diperlukan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan serta pengendalian kegiatan lintas sektor serta

antar tingkat pemerintah dan masyarakat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, 2022).

Berdasarkan observasi awal Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang salah satu desa baru yang di bentuk sekitar 8 (delapan) tahun, hasil pemekaran dari Desa Bungi, yang memiliki dua Dusun yaitu Dusun Barugae dan Dusun Ceppaga. Salah satu desa yang memiliki peningkatan angka stunting karena wilayah Desa Barugae termasuk kecil dibandingkan desa lainnya yang ada di Kecamatan Duampanua. Berdasarkan data yang terdapat di Poskesdes Desa Barugae, persebaran balita penderita stunting pada tahun 2021 sebesar 15 anak, 3 anak mengalami tinggi badan sangat pendek dan 12 anak tinggi badan pendek. Sedangkan pada tahun 2022 angka stunting mencapai 18 anak.

Kekurangan gizi dalam waktu lama terjadi sejak janin dalam kandungan sampai 1000 Hari Pertama Kehidupan penyebabnya adalah faktor gizi yang dialami oleh ibu hamil maupun balita, faktor pola asuh yang kurang dalam pemberian makanan kepada anak, tidak memberikan asupan gizi yang baik, pernikahan dini pada perempuan yang masih dalam usia pertumbuhan, sehingga apabila hamil dapat mengakibatkan anaknya mengalami

gagal tumbuh sebab kompetisi asupan gizi antara ibu dan anak. Penanganan stunting ini tidak dapat ditangani jika hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja, karena membutuhkan peran serta dari berbagai pihak atau *stakeholder* yang secara bersama melakukan kolaborasi.

Berbagai penelitian telah dilakukan di Indonesia khususnya terkait topik *Collaborative governance* dalam penanganan stunting. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Afandi et al., (2023) di Jawa Barat, dalam penelitiannya menyampaikan bahwa kolaborasi dalam intervensi stunting hanya sebagian besar dilakukan oleh lembaga pemerintah namun lembaga non-pemerintah tidak sepenuhnya dilibatkan. Kemudian, penelitian dari Imanuel Hadi, (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kasus prevalensi stunting di Papua mencapai 34,6%, dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut ialah dengan menggunakan pendekatan kolaboratif. Sedangkan penelitian dari Niga, (2023) menyatakan bahwa jumlah kasus stunting mencapai 42,62% atau prevalensi stunting sangat tinggi sehingga perlu adanya proses tata kelola kolaborasi.

Sekalipun sudah ada beberapa penelitian yang membahas terkait *Collaborative governance* dalam

penanganan stunting di Indonesia. Namun, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang dijelaskan sebelumnya. Terutama terkait perbedaan lokasi penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berlokasi di Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep *Collaborative governance* dalam penanggulangan stunting.

METODE

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori *Collaborative governance* dari ansell and gash (2008). Lokasi penelitian ini berada di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena desa tersebut merupakan salah satu desa yang memiliki peningkatan angka stunting yang tinggi jika dibandingkan desa lainnya yang ada di Kecamatan Duampanua.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif (Creswell, 2016). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi (Rahardjo, 2011). Proses pengumpulan

data dalam penelitian sering melibatkan tiga pendekatan utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi memungkinkan peneliti untuk secara langsung mengamati perilaku atau fenomena yang ingin diteliti tanpa memengaruhi subjek. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman, pandangan, atau pengetahuan subjek. Sementara itu, melalui dokumentasi, peneliti menganalisis berbagai dokumen, catatan, atau materi yang relevan dengan topik penelitian, memberikan wawasan tambahan atau konfirmasi terhadap temuan. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan akurat tentang topik yang diteliti, memberikan landasan yang kokoh bagi analisis dan interpretasi yang lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi, menurut definisi (Sugiyono, 2013), merupakan pendekatan pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber data yang telah ada. Dalam konteks ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber,

yang melibatkan perbandingan dan pemeriksaan kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sementara itu, teknik analisis data, seperti yang dijelaskan oleh (Moleong, 2010), merujuk pada proses sistematis dalam menemukan dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat dikomunikasikan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu kebijakan nasional dalam upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi masyarakat, yaitu perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan pelaku sadar gizi, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi serta kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Lahirnya *Collaborative governance* antara Pemerintah Desa Barugae, Bidan Desa Barugae, PKK/Kader Posyandu, KPM (Kader Pembangunan Manusia) serta Masyarakat dalam penanggulangan stunting di Desa Barugae.

Ansell dan Gash (2008) merumuskan model *Collaborative*

governance berdasarkan kajian literatur. Model tersebut memiliki empat fenomenapenting yang dijadikan sebagai pusat perhatian. Proses kolaboratif merupakan inti dari model kolaborasi. Sedangkan kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif dipresentasikan sebagai pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam proses kolaborasi, dalam penanggulangan stunting di Desa Barugae.

Kondisi Awal

Kondisi awal menurut Ansell dan Gash (2008) dalam jurnalnya yang berjudul “*Collaborative Governance in Theory and Practice*” yaitu kondisi awal adalah kondisi sebelum proses kolaborasi terjadi, dimana menjadi pendukung ataupun penghambat kerjasama antar pemangku kepentingan.

Kondisi Awal dalam penanggulangan stunting dipengaruhi oleh beberapa fenomena yaitu masih tingginya stunting di Kabupaten Pinrang, dan meningkatnya angka stunting di Kecamatan Duampanua serta meningkatnya angka stunting di Desa Barugae Kecamatan Duampanua dan ketidakseimbangan sumberdaya untuk berpartisipasi dalam penanggulangan stunting.

Kondisi Awal dari *Collaborative Governance* dalam penanggulangan stunting di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang berawal dari meningkatnya angka stunting di Kabupaten Pinrang, Jumlah balita stunting di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebanyak 3.676, pada tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 3.154, sedangkan pada tahun 2021 balita stunting sekitar 2.688. Meskipun penderita stunting di Kabupaten Pinrang mengalami penurunan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Tetapi Kabupaten Pinrang masih memiliki masalah kesehatan yang dialami masyarakat.

Prevalensi stunting di kecamatan Duampanua pada tahun 2019 sekitar 10,19% sedangkan pada tahun 2020 angka stunting sekitar 10,43%. Sedangkan di Desa Barugae angka stunting pada tahun 2021 sekitar 15 anak dan meningkat pada tahun 2022 sekitar 18 anak.

Hal yang menyebabkan peningkatan angka stunting di Desa Barugae yaitu kurangnya kesadaran ibu balita terhadap kesehatan gizi anak dan kesadaran membawa anak posyandu, masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki WC atau WC yang rusak sehingga membuang air besar di

sembarangan tempat, serta pengelolaan sampah dan limbah cair rumah tangga.

Maka sangat dibutuhkan kerjasama antara Kepala Desa Barugae Bersama Dengan Bidan Desa Barugae, KPM (Kader Pembangunan Manusia), PKK/Kader Posyandu dan Masyarakat yang paling penting dalam penanggulangan stunting di Desa Barugae. Agar masyarakat sadar apa yang mereka lakukan, sehingga tetap menjaga lingkungannya demi kebaikan bersama.

Melihat kondisi awal saat praktik pemerintahan kolaboratif sangat penting karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan, peluang, dan sumber daya yang tersedia sebelum memulai kolaborasi. Hal ini sejalan dengan pendapat dari bahwa dalam upaya *Collaborative governance* hal yang penting dilakukan adalah melihat sesuatu yang bisa menjadi tantangan dalam kolaborasi (Hardi, 2020). Dengan pemahaman yang jelas tentang konteks awal, para pemangku kepentingan dapat merencanakan dengan lebih efektif, merancang strategi yang sesuai, dan menetapkan tujuan yang realistis untuk kolaborasi mereka. Selain itu, memahami kondisi awal juga membantu dalam membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, menunjukkan transparansi, konsistensi,

dan komitmen untuk bekerja sama (Islamy, 2018). Ketika kondisi awal dibandingkan dengan kondisi yang dicapai selama atau setelah kolaborasi, ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan kolaborasi, serta mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan (Mungkasa, 2022). Melalui pemahaman yang mendalam tentang kondisi awal, kolaborasi dapat didorong untuk menjadi lebih inklusif, melibatkan semua pihak terkait dengan cara yang efektif, dan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam mencapai tujuan bersama.

Desain Kelembagaan

Menurut teori Ansell dan Gash (2008) dalam jurnalnya yang berjudul “*Collaborative Governance in Theory and Practice*” yaitu Desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi.

Bupati Pinrang menginstruksikan kepada para Camat dan Kepala Desa untuk memastikan seluruh mandatory dalam mencegah stunting betul-betul terprogram dan teranggarkan dalam Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2021 dan 2022.

dimana terlebih dahulu melakukan pertemuan atau musyawarah dengan Bidan Desa Barugae, PKK/Kader Posyandu, KPM (Kader Pembangunan Manusia) dan Masyarakat mengenai program dalam penanggulangan stunting di Desa Barugae.

Berkaitan dengan proses transparansi dalam kolaborasi dilakukan pertemuan yang dilakukan sebagai sarana untuk mewujudkan keterbukaan antar *stakeholder* yang terlibat, diselenggarakan Pemerintah Desa Barugae atau Bidan Desa Barugae melalui kegiatan pertemuan yang dilakukan diakhir kelas ibu balita dan kelas ibu hamil.

Desain Kelembagaan terhadap aturan dasar atau kerangka kerja dalam proses kolaborasi dalam penanggulangan stunting di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Pemerintah Desa Barugae aturan dasarnya melalui intervensi gizi sensitif yang ditunjukkan berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, sasarannya adalah penderita stunting dan masyarakat umum dengan menggunakan Dana Desa.

Desain kelembagaan dalam proses kolaborasi dalam penanggulangan stunting di Desa Barugae menurut Bidan Desa Barugae bersama KPM dan PKK/Kader Posyandu yaitu aturan

dasarnya adalah proses kolaborasi melalui intervensi gizi spesifik yang ditunjukkan kepada ibu hamil dan anak yang mengalami stunting, kegiatan ini berhubungan langsung dengan sektor kesehatan.

Desain kelembagaan dalam praktik pemerintahan kolaboratif adalah esensial untuk memastikan kesuksesan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan (Gash, 2022). Ini melibatkan pendirian struktur yang jelas untuk koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program (Zein & Septiani, 2023). Pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi tidak dapat dilebih-lebihkan, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi pilar penting dalam kelembagaan kolaboratif, memastikan bahwa proses dan hasil kolaborasi dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait (Kayyali, 2023). Komitmen jangka panjang dari semua pihak terlibat juga merupakan faktor kunci untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas kolaborasi. Dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, serta mekanisme evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan, praktik pemerintahan

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>

kolaboratif dapat menjadi alat yang kuat dalam mengatasi masalah kompleks dan mencapai tujuan bersama.

Kepemimpinan

Menurut teori Ansell dan Gash (2008). Kepemimpinan yang kuat yakni dihormati dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan akan sangat dibutuhkan dalam sebuah kolaborasi karena akan lebih mungkin kolaborasi akan berhasil. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya muncul dari komunitas para pemangku kepentingan itu sendiri.

Kepemimpinan penting untuk merangkul, memberdayakan dan melibatkan para pemangku kepentingan untuk kesuksesan kolaborasi. Salah satu fokus Pemerintah Desa Barugae adalah pengawasan dan evaluasi dalam kegiatan kolaborasi dalam penanggulangan stunting di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, memastikan bahwa aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Desa Barugae, Bidan Desa Barugae, PKK/Kader Posyandu, KPM (Kader Pembangunan Manusia), Dan Masyarakat Desa Barugae melaksanakan kegiatan/program dalam kolaborasi sehingga dapat mewujudkan tujuan bersama.

Kepemimpinan dalam proses *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Stunting di Desa

Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, yaitu pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* cukup efektif karena masing-masing mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan stunting Desa Barugae.

Pemerintah Desa Barugae sebagai fasilitator dalam penanggulangan stunting dan tetap melakukan pemantauan terhadap balita stunting yang saling berkerja sama dengan Bidan Desa Barugae yang dibantu oleh PKK/Kader Posyandu, KPM dan Masyarakat. Dimana melibatkan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam melaksanakan musyawarah. Peran pemangku kepentingan yang terlibat didasarkan pada tupoksi masing-masing dengan melakukan kegiatan kolaborasi yang berupa perencanaan dan implementasi.

Pengawasan yang dilakukan para pemangku kepentingan cukup efektif meskipun masih terdapat masalah yaitu masih ada masyarakat yang layak diberikan bantuan tetapi tidak mendapatkan.

Berkerja sama dengan Bidan Desa Barugae yang dibantu oleh PKK/Kader Posyandu dari sektor kesehatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan penanggulangan stunting, KPM (Kader Pembangunan Manusia) Desa Barugae

memiliki tanggung jawab dalam menyimpan semua data tentang stunting dan Masyarakat dalam memantau balita stunting setiap bulannya apakah ada perkembangan atau tidak, melakukan kegiatan sosialisasi sebelum jadwal posyandu, agar ibu balita rajin membawa anaknya posyandu, dalam rangka untuk menekan prevalensi stunting.

Pengawasan yang dilakukan para pemangku kepentingan cukup efektif meskipun masih terdapat masalah yaitu masih ada masyarakat yang layak diberikan bantuan tetapi tidak mendapatkan.

Kepemimpinan dalam praktik pemerintahan kolaboratif adalah landasan yang vital untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan (Lima, 2021). Bahkan Dickinson et al., (2022) menyampaikan bahwa seorang pemimpin kolaboratif bertindak sebagai fasilitator utama, membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat, serta mengkoordinasikan upaya kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain, pemimpin kolaboratif membimbing pemangku kepentingan menuju visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi, keterbukaan,

dan inklusivitas adalah nilai inti dalam kepemimpinan kolaboratif, memastikan bahwa semua pihak terlibat merasa didengar, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi (Clark, 2021). Fleksibilitas, adaptabilitas, dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman juga menjadi kunci dalam kepemimpinan kolaboratif, memungkinkan pemimpin untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks. Melalui kombinasi karakteristik ini, pemimpin kolaboratif dapat memfasilitasi proses kolaborasi yang dinamis, produktif, dan bermakna, yang menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam memecahkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat (Azhar et al., 2023; Darma Sabri et al., 2024; Noor et al., 2022).

Proses Kolaboratif

Menurut Ansell dan Gash (2008) fenomena proses kolaboratif merupakan inti dari model yang mereka kemukakan. Dalam penelitian ini, proses kolaboratif digunakan untuk menganalisis, mendeskripsikan pelaksanaan program kolaborasi dalam penanggulangan

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>

stunting di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Proses Kolaboratif dalam Penanggulangan Stunting di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, sesuai Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dengan pihak Pemerintah Kecamatan Duampanua setempat dan Pemerintah Desa Barugae dalam Penanggulangan stunting di Desa Barugae, di mulai dari pemetaan sasaran terhadap warga desa yang anaknya terindikasi terkena stunting, dilakukan oleh petugas kesehatan bekerjasama dengan kader Posyandu, KPM dan selanjutnya lewat rembuk stunting kita membahas bagaimana langkah-langkah yang di perlukan dalam penanganan stunting.

Adapun bentuk kerjasama atau program yang dilakukan Pemerintah Desa Barugae, Bidan Desa Barugae, Kader Posyandu, KPM (Kader Pembangunan Manusia) dan Masyarakat penanggulangan stunting di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu sebagai berikut: (a) Dimulai dengan melakukan pemetaan sasaran terhadap warga Desa Barugae yang anaknya terindikasi terkena stunting. (b) Melaksanakan rembuk stunting atau musyawarah bagaimana langkah-langkah yang akan

dilakukan dalam penanggulangan stunting di Desa Barugae dalam melaksanakan program tersebut. (c) Pemberian makanan tambahan seperti bubur, suplemen vitamin, susu dan telur bagi balita stunting dan ibu hamil. (d) Penimbangan dan pengukuran tinggi badan setiap bulannya terhadap balita stunting. (e) Bantuan WC dari pemerintah pusat maupun bantuan WC dari Pemerintah Desa Barugae menggunakan Dana Desa bagi balita stunting, ibu hamil, lansia dan masyarakat yang tidak memiliki WC di Desa Barugae. (f) Bantuan Ikan Lele bagi balita yang mengalami stunting di Desa Barugae. (g) Penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat agar tetap menjaga kebersihan di sekitar rumahnya dalam penanggulangan stunting. (h) Pembangunan poskesdes dan pengadaan ambulance Desa.

Sedangkan kendala yang dialami para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan stunting di Desa Barugae yaitu kurangnya kesadaran ibu terhadap gizi anak dan kurangnya kesadaran ibu-ibu membawa anaknya posyandu, serta terdapat masyarakat yang berhak mendapat bantuan WC tetapi tidak memiliki lahan. Kolaborasi penanggulangan stunting di Desa Barugae ditunjukkan adanya peningkatan komunikasi antar

stakeholder pada saat posyandu setiap bulannya maupun dalam pembagian bantuan lainnya dalam rangka untuk mendorong perekonomian khususnya keluarga balita stunting.

Stunting merupakan kondisi gagal tubuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan, pada masa awal setelah anak lahir, tetapi baru terlihat setelah anak berusia 2 tahun atau 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Di mana keadaan gizi ibu dan anak yang menjadi faktor penting dari pertumbuhan anak. Periode 0-24 bulan usia anak merupakan periode sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi masa ini bersifat permanen. Mengingat efek jangka pendek dari masalah pola makan ini termasuk gangguan perkembangan otak, kecerdasan, penurunan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme dalam tubuh, efek jangka panjangnya dapat mencakup penurunan kapasitas kognitif, prestasi belajar dan kekebalan.

Proses kolaborasi dalam pemerintahan kolaboratif dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang memerlukan kerja sama lintas-sektor dan lintas-pemangku kepentingan (Kaginalkar et al., 2023). Selanjutnya,

pemangku kepentingan yang terlibat diidentifikasi dan diundang untuk berpartisipasi dalam forum kolaboratif yang dibentuk. Bersama-sama, mereka merumuskan tujuan bersama dan visi untuk kolaborasi mereka, serta mengembangkan rencana tindakan untuk mencapainya. Selama implementasi, koordinasi yang efektif dan manajemen konflik menjadi kunci, sambil terus melakukan evaluasi berkala untuk mengevaluasi kemajuan dan mengidentifikasi peluang pembelajaran. Kolaborasi juga melibatkan upaya untuk membangun kapasitas dan memastikan keberlanjutan dari hasil kolaboratif (Ardhiyansyah et al., 2023). Melalui tahapan-tahapan ini, proses kolaborasi dalam pemerintahan kolaboratif berfungsi sebagai kerangka kerja yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama, memecahkan masalah yang kompleks, dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Stunting di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Kondisi awal kolaborasi dalam

penanggulangan stunting di Desa Barugae berawal dari meningkatnya angka stunting pada tahun 2021-2022 penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran ibu balita terhadap gizi anak dan kesadaran membawa anak posyandu, masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki WC atau rusak, sehingga membuang air besar di sembarangan tempat dan pengelolaan sampah, limbah cair rumah tangga. (2) Desain kelembagaan orasi berkaitan aturan dasar dalam penanggulangan stunting di Desa Barugae sudah cukup baik dalam pelaksanaan program. Pemerintah Desa Barugae aturan dasarnya melalui intervensi gizi kegiatan pembangunan di sektor kesehatan dengan menggunakan Dana Desa. (3) Kepemimpinan terhadap proses kolaborasi dalam penanggulangan stunting di Desa Barugae cukup baik dalam pengawasan kegiatan program dan melakukan pemantauan terhadap balita stunting. (4) Proses kolaboratif pada penanggulangan stunting di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program. Meskipun masih terdapat kendala yang dialami pemerintah setempat dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program.

Sebaiknya pemerintah Desa Barugae beserta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan stunting, agar sering-sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat siapa saja yang berhak mendapat bantuan stunting dan ibu balita sadar untuk membawa anaknya posyandu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan sumbangsih dari berbagai aktor seperti seluruh pihak pemerintah desa yang ada di Kecamatan Duampanua dan Seluruh civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Karena dengan bantuan bapak/ibu sekalian sehingga artikel kami ini bisa selesai.

REFERENSI

- Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). *Collaborative Governance in a Mandated Setting: Shifting Collaboration in Stunting Interventions at Local Level. Development Studies Research, 10*(1).
<https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), pp. 543–571.

- Ardhiyansyah, A., Sulistyowati, N. W., Hidayati, N., & Handayani, E. (2023). Inovasi Berkelanjutan: Pendekatan Kolaboratif untuk Mengatasi Tantangan Sosial-Ekonomi di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), pp. 460–467.
- Arsandi, S. (2022). *Collaborative Governance* in the Optimization of Tax Revenue: Case Study in Yogyakarta. *Jurnal Bina Praja*, 14(1), pp. 17–29. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.17-29>
- Azhar, M. F., Rhamdani, F. W., Wulandari, F. S., Pamungkas, A. G., Saputri, J. A., & Andiany, A. R. (2023). Kolaborasi Mahasiswa dan Masyarakat Desa dalam Mengatasi Tantangan Sosial Melalui Program KKN di Desa Pisangan Jaya. *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*, 1(6), pp. 20–47.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. (2022). *Kabupaten Pinrang Dalam Angka Pinrang Regency Figures 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang.
- Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing *Collaborative Governance*: Models, Experiences, and Challenges. *Public Management Review*, 23(11), pp. 1581–1589. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777>
- Castañer, X., & Oliveira, N. (2020). Collaboration, Coordination, and Cooperation Among Organizations: Establishing the Distinctive Meanings of These Terms Through a Systematic Literature Review. *Journal of Management*, 46(6), pp. 965–1001. <https://doi.org/10.1177/0149206320901565>
- Clark, J. K. (2021). Public values and public participation: A case of *Collaborative governance* of a planning process. *The American Review of Public Administration*, 51(3), pp. 199–212.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi keempat.*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabri, D., Adam, M., Utami, S., & Harmen, H. (2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Dickinson, H., Brown, A., Robinson, S., Parham, J., & Wells, L. (2022). Building *Collaborative Leadership*: A Qualitative Evaluation of The Australian *Collaborative Pairs Trial*. *Health & Social Care in the Community*, 30(2), pp. 509–518.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative Framework for *Collaborative Governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), pp. 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Eriksson, E., Gadolin, C., Andersson, T., Hellström, A., & Lifvergren, S. (2022). Value Propositions in Public Collaborations: Regaining Organizational Focus Through Value Configurations. *British Journal of Management*, 33(4), pp. 2070–2085. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12567>
- Farhanuddin, A. F., Setia, A. A. P., & Jauza, D. (2021). Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan *Good Governance*. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), pp. 64–74.

- Fauziah, N., Aviani, J. K., Agrianfanny, Y. N., & Fatimah, S. N. (2022). Intestinal Parasitic Infection and Nutritional Status in Children under Five Years Old: A Systematic Review. *Tropical Medicine and Infectious Disease*, 7(11), p. 371. <https://doi.org/10.3390/tropicalmed7110371>
- Gash, A. (2022). *Collaborative governance*. In *Handbook on theories of governance* (pp. 497–509). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Astuti, R. S., Hardi, W., Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Hadi, N, I. (2023). Challenges and Opportunities of *Collaborative Governance* in Addressing Stunting: Lessons from Papua. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14183>
- Kaginalkar, A., Kumar, S., Gargava, P., & Niyogi, D. (2023). Stakeholder Analysis for Designing an Urban Air Quality Data Governance Ecosystem in Smart Cities. *Urban Climate*, 48, 101403.
- Kayyali, M. (2023). The relationship between rankings and academic quality. *International Journal of Management, Sciences, Innovation, and Technology IJMSIT*, 4(3), pp. 1–11.
- Kompas.Com. (2022). *Kasus Stunting Pada Anak di Indonesia Masih Tinggi, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/sains/read/2022/02/24/173000023/kasus-stunting-pada-anak-di-indonesia-masih-tinggi-dokter-ingatkan>
- Islamy, L, O, S, H. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lapuente, V., & Walle, S, V. D. (2020). The effects of New Public Management on The Quality of Public Services. *Governance*, 33(3), pp. 461–475. <https://doi.org/10.1111/gove.12502>
- Lima, V. (2021). *Collaborative Governance for Sustainable Development*. In *Peace, Justice and Strong Institutions*, pp. 79–90.
- Mahadiansar, M., Alfiandri, A., & Syuzairi, M. (2023). *Analysis of Collaborative Governance in Tourism Based on Coastal Community Empowerment in Indonesia*, pp. 5–10. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-150-0_2
- Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mungkasa, O. (2022). *Optimalisasi Peran dan Fungsi Forum Penataan Ruang sebagai Wadah Kolaborasi Pemangku Kepentingan*.
- Nada, N. Q. K., Haerah, K., & Ningtiyas, B. K. (2020). *Collaborative Governancedalam Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Jember*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), pp. 809–820.
- Nasrulhaq, N. (2020). Nilai Dasar *Collaborative Governance* Dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), pp. 395–402. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.2261>
- Nasution, N. F., & Trimurni, F. (2024). Government Collaboration in Stunting Prevention Programme in Medan City. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(1), pp. 23–34.

- <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i1.7518>
- Niga, J. D. (2023). *Collaborative Governance in an Effort to Reduce Stunting Rate in TTS District, NTT Province. International Journal of Social Service and Research*, 3(4), pp. 1060–1067. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.355>
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: Bildung.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. Bahan Ajar.
- Rusliadi, R., & Aina, A. N. (2024). Social Welfare Policy and Cross-Sectoral Participation: For Resilience Overcoming Stunting in Indonesia. *Government & Resilience*, 2(1), pp. 1–13. <https://doi.org/10.62503/gr.v2i1.10>
- Samsurizal, R., Baron, P., & Probo, T. (2023). Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional *Collaborative Governance* dalam Pencegahan Peredaran Narkoba di Indonesia *Collaborative Governance* dalam Pencegahan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(1).
- Sari, A. R. (2023). The Impact of Good Governance on the Quality of Public Management Decision Making. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 1(2), pp. 39–46. <https://doi.org/10.61100/adman.v1i2.21>
- Siddiqui, F., Salam, R. A., Lassi, Z. S., & Das, J. K. (2020). The Intertwined Relationship Between Malnutrition and Poverty. *Frontiers in Public Health*, 8. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00453>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suwarna, R. (2023). *Collaborative Governance* dalam Menciptakan Branding Kota Surakarta Sebagai Kota Festival. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), pp. 160–184. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i2.10846>
- Tinov, M. T., Isril, I., Harirah, Z., & Wasillah, A. (2024). Stunting Prevention in *Collaborative Governance* Perspective. In *International Conference on Social and Politics (ICSP 2023)* (pp. 172-180). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-194-4_19
- Arumsari, W., Rarastiti, C. N., Rahayu, S., Sudrajat, A., & Triwahyuni, Y. (2024). Pemulihan Balita Stunting Melalui Kemitraan Lintas Sektor. *Borneo Community Health Service Journal*, 4(1), pp. 43-52. <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/neotyce.v4i1.4938>
- Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2023). *Ilmu Administrasi Negara*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.